



BABON INTERNASIONAL

*Dari Unipolar ke Multipolar: Serakahnomics dan
Perebutan Hegemoni Ekonomi Global*



**LIGA MAHASISWA
NASIONAL UNTUK
DEMOKRASI**

Dari Unipolar ke Multipolar: Serakahnomics dan Perebutan Hegemoni Ekonomi Global

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem internasional dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran gradual dari konfigurasi unipolar menuju tatanan yang semakin multipolar. Pasca Perang Dingin, dominasi global Amerika Serikat tampak relatif tanpa penyeimbang yang sebanding. Struktur internasional yang semula bertumpu pada supremasi tunggal Washington kini menghadapi tantangan dari kebangkitan kekuatan-kekuatan baru. Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang semakin assertif; Rusia mengaktifkan kembali peran strategisnya dalam politik keamanan global; sementara kekuatan regional di berbagai kawasan menunjukkan konsolidasi kapasitas politik dan ekonomi. Rivalitas dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran, serta ketegangan berulang antara India dan Pakistan menegaskan bahwa transisi menuju multipolaritas berlangsung dalam suasana kompetisi terbuka, fragmentasi ekonomi, dan ketidakpastian strategis.

Sejumlah analisis menilai bahwa tata dunia multipolar membuka peluang redistribusi kekuatan yang lebih seimbang, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa instabilitas regional dan polarisasi global. Kebangkitan negara-negara Global South dengan narasi kedaulatan ekonomi dan solidaritas Selatan-Selatan tercermin dalam penguatan BRICS sebagai forum kerja sama alternatif. Blok ini yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta anggota baru merepresentasikan lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto global. Upaya pengembangan mekanisme keuangan alternatif, penguatan bank pembangunan, serta peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional menjadi indikator bahwa struktur global tidak lagi sepenuhnya berpusat pada satu hegemon, melainkan bergerak menuju konfigurasi yang lebih plural dan kompetitif.



II. Make America Great Again



Dalam transisi sistem internasional dari unipolar menuju konfigurasi yang lebih multipolar, kembalinya doktrin Donald Trump melalui slogan **Make America Great Again** merepresentasikan artikulasi ulang nasionalisme ekonomi Amerika. MAGA bukan sekadar retorika kampanye domestik, tetapi orientasi strategis yang menempatkan supremasi kepentingan nasional di atas stabilitas sistem global. Kebijakan tarif tinggi terhadap Tiongkok, penarikan diri dari berbagai komitmen multilateral, serta penekanan pada repatriasi industri manufaktur adalah manifestasi konkret dari pendekatan proteksionis dan unilateral tersebut.

"We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again"

Donald J. Trump

Di sinilah konsep serakahnomics menemukan relevansinya. Serakahnomics dapat dipahami sebagai rasionalitas ekonomi negara yang:

MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN NASIONAL TANPA BATAS NORMATIF GLOBAL.

MENGABAIKAN EKSTERNALITAS SISTEMIK TERHADAP NEGARA LAIN

MENGUTAMAKAN KEAMANAN EKONOMI DOMESTIK DI ATAS STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

MENORMALISASI KEBIJAKAN KOERSIF (TARIF, SANKSI, TEKANAN FINANSIAL) SEBAGAI INSTRUMEN KOMPETISI EKONOMI.

Memaknai *Serakahnomics* dalam Kerangka MAGA

Dalam kerangka teori ekonomi klasik, kebijakan proteksionis dapat dibenarkan sebagai strategi korektif atas ketidakseimbangan perdagangan. Namun dalam praktik MAGA, orientasi tersebut melampaui koreksi teknis dan berubah menjadi logika zero-sum: keuntungan pihak lain dipandang sebagai kerugian Amerika. Rasionalitas ini mencerminkan transformasi *self-interest* menjadi *greed* pada level negara.

Secara teoritis, terdapat tiga implikasi penting.

1. Serakahnomics menunjukkan bahwa Greed (Serakah) tidak hanya bersifat individual atau korporasi, tetapi dapat terinstitusionalisasi dalam kebijakan negara. Jika perusahaan mengejar laba maksimal tanpa batas etis, negara dalam kerangka MAGA mengejar supremasi ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan global.
2. Dalam sistem internasional yang semakin multipolar, pendekatan unilateral berpotensi mempercepat fragmentasi tatanan ekonomi global. Ketika negara hegemon memilih proteksionisme agresif, negara lain terdorong melakukan respons serupa. Akibatnya, rezim perdagangan multilateral melemah dan risiko konflik ekonomi meningkat.
3. Legitimasi greed terbentuk melalui wacana. MAGA bekerja tidak hanya sebagai kebijakan, tetapi sebagai narasi yang menormalisasi bahwa "America First" adalah bentuk rasionalitas ekonomi yang sah. Dalam konteks ini, moralitas global digeser oleh kalkulasi nasional.

Dengan demikian, serakahnomics bukan sekadar kritik moral terhadap kebijakan proteksionis, melainkan kategori analitis untuk memahami bagaimana rasionalitas ekonomi nasional dapat bergeser dari *self-interest* yang terkelola menuju *greed* yang sistemik. Dalam situasi transisi menuju multipolaritas, orientasi semacam ini berpotensi memperdalam rivalitas ekonomi global, mempercepat deglobalisasi parsial, dan menguji kembali relevansi institusi multilateral yang selama ini menopang stabilitas sistem internasional.

Praktik serakahnomics tampak dalam kebijakan tarif tinggi terhadap Tiongkok, termasuk tarif 25 persen untuk baja dan aluminium, pembatasan ekspor teknologi strategis seperti semikonduktor, serta ekspansi rezim sanksi ekonomi. Dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global dimanfaatkan sebagai instrumen geopolitik: akses terhadap sistem perbankan internasional dapat dibatasi, aset dapat dibekukan, dan embargo energi dapat diberlakukan terhadap negara-negara yang dianggap menentang kepentingan Washington. Negara-negara seperti Iran dan Venezuela merasakan langsung dampak pembatasan tersebut. Dalam perspektif ekonomi-politik global, imperialisme kontemporer tidak lagi tampil sebagai kolonialisme teritorial, melainkan sebagai kontrol struktural atas arsitektur finansial, teknologi, dan perdagangan dunia.



Eskalasi di Venezuela memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi intervensi politik dan militer yang kontroversial. Sementara di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dalam konteks dukungan Washington terhadap Israel memicu kekhawatiran atas perluasan konflik regional. Dalam tatanan hukum internasional, penggunaan kekuatan sepihak dan sanksi ekstrateritorial mengundang perdebatan serius mengenai legitimasi, kedaulatan, dan prinsip non-intervensi.

Jika dianalisis melalui Power Transition Theory, dinamika ini mencerminkan kecemasan hegemon lama dalam menghadapi kemunculan kekuatan alternatif. Kebangkitan BRICS, serta upaya mereka membangun mekanisme pembayaran lintas negara di luar dominasi dolar, dapat dibaca sebagai respons terhadap praktik serakahnomics. Dalam perspektif hegemoni Gramscian, dominasi tidak hanya ditegakkan melalui kekuatan material, tetapi juga melalui pembentukan wacana global tentang legitimasi dan "aturan berbasis tatanan internasional". Upaya delegitimasi terhadap BRICS melalui narasi ketidakstabilan internal, tekanan diplomatik terhadap negara calon anggota, maupun sanksi terhadap anggotanya mencerminkan strategi mempertahankan supremasi struktural.

Dalam kerangka teoritik hubungan internasional, realisme struktural melihat perubahan distribusi kapabilitas material sebagai pendorong utama perilaku negara. Sementara itu, konstruktivisme menekankan bahwa norma, identitas, dan persepsi turut membentuk dinamika global. Perdebatan mengenai potensi fragmentasi nilai dapat dirujuk pada pandangan Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilizations*, yang menyoroti kemungkinan konflik berbasis peradaban. Meski kontroversial, meningkatnya nasionalisme dan politik identitas menunjukkan bahwa dimensi ideasional semakin memengaruhi praktik hubungan internasional kontemporer.



Spirit Kosmopolitanisme

Namun, transisi menuju multipolaritas tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi kekuatan militer dan ekonomi negara-negara besar. Masyarakat internasional melalui organisasi internasional, masyarakat sipil transnasional, serta opini publik global memainkan peran signifikan dalam membentuk batas legitimasi tindakan negara. Keterhubungan digital memperkuat kapasitas masyarakat untuk memantau dan mengkritisi kebijakan luar negeri. Gerakan solidaritas internasional dalam isu kemanusiaan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa dimensi normatif tetap menjadi elemen penting dalam membentuk arah tatanan dunia. Stabilitas multipolar pada akhirnya bergantung pada kemampuan membangun konsensus etis yang melampaui kepentingan sempit dan praktik serakahnomics yang eksklusif.



Mahatma Gandhi pernah mengingatkan: *“dunia ini cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan segelintir orang.”*

Dalam konteks ini, semangat kosmopolitanisme menjadi landasan penting bagi pembentukan tata dunia yang lebih adil dan inklusif. Kosmopolitanisme memandang manusia sebagai bagian dari komunitas moral global yang melampaui batas-batas negara, sehingga solidaritas, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip utama dalam hubungan internasional. Perspektif ini mendorong negara-negara untuk tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan nasional yang sempit, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat global. Dengan demikian, di tengah kompetisi kekuatan besar dan praktik ekonomi yang sering kali didorong oleh logika serakahnomics, kosmopolitanisme menawarkan kerangka etis yang menegaskan pentingnya kerja sama global, keadilan distributif, serta komitmen bersama terhadap perdamaian, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia.

Indonesia di tengah Gejolak Geopolitik Dunia



Dalam konteks transisi global yang diwarnai oleh unilateralisme dan kecenderungan serakahnomics dalam kerangka Make America Great Again, posisi Indonesia memperoleh dimensi strategis yang semakin penting. Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab historis.

Sebagai negara dengan posisi geostrategis di persilangan Samudra Hindia dan Pasifik serta ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berpotensi menjadi balancer sekaligus jembatan diplomatik antar-kutub kekuatan global. Prinsip politik luar negeri Bebas dan Aktif menjadi fondasi normatif untuk menjaga otonomi kebijakan tanpa terjebak dalam rivalitas eksklusif maupun tekanan logika zero-sum yang melekat dalam serakahnomics.



Dalam periode kepemimpinan Prabowo Subianto, penegasan terhadap otonomi strategis dan kemandirian nasional memperoleh urgensi baru. Jika serakahnomics merepresentasikan rasionalitas sepihak yang memusatkan keuntungan nasional tanpa memperhitungkan stabilitas sistemik global, maka orientasi kebijakan Prabowo cenderung bergerak ke arah sebaliknya: memperkuat kepentingan nasional tanpa menutup ruang kerja sama kolektif. Pendekatan ini terlihat dalam upaya menjaga hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, sembari membuka kanal konsolidasi Global South melalui platform seperti BRICS.

Strategi tersebut bukan bentuk ambiguitas, melainkan ekspresi dari bebas aktif dalam era multipolar. Indonesia tidak menempatkan diri sebagai subordinat dalam kompetisi kekuatan besar, tetapi sebagai aktor otonom yang memaksimalkan ruang manuver diplomatik. Dalam konteks ini, melawan serakahnomics bukan berarti konfrontasi langsung terhadap negara tertentu, melainkan menolak logika dominasi eksklusif dan memperjuangkan tata kelola global yang lebih inklusif dan setara.

Penutup

Efektivitas posisi tersebut sangat bergantung pada penguatan fondasi domestik. Prabowo menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kemandirian diplomatik ditopang oleh kemandirian ekonomi. Ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri strategis, serta penguasaan teknologi menjadi prasyarat agar Indonesia tidak mudah ditekan oleh volatilitas pasar global atau kebijakan proteksionis negara besar. Diversifikasi mitra dagang harus berjalan seiring dengan industrialisasi nasional dan penguatan sistem keuangan domestik. Tanpa itu, multipolaritas hanya akan memindahkan ketergantungan dari satu pusat kekuatan ke pusat kekuatan lain.

Di sinilah letak pembeda antara adaptasi pasif dan perlawanan strategis. Adaptasi pasif berarti sekadar menyesuaikan diri terhadap tekanan global; perlawanan strategis berarti membangun kapasitas nasional agar tidak tunduk pada logika dominasi ekonomi mana pun. Dalam kerangka ini, visi kemandirian nasional yang diusung Prabowo dapat dipahami sebagai upaya membentengi Indonesia dari eksekutif serakahnomics sekaligus memperbesar daya tawar dalam negosiasi global.

Secara keseluruhan, pergeseran menuju multipolaritas merupakan realitas struktural dengan konsekuensi multidimensional. Arogansi unilateralisme dalam semangat MAGA mencerminkan upaya mempertahankan dominasi lama melalui instrumen ekonomi dan finansial. Di sisi lain, pertumbuhan BRICS dan konsolidasi Global South menandai munculnya alternatif terhadap unipolaritas. Dunia berada pada momentum krusial: antara mempertahankan hegemoni lama dengan risiko fragmentasi sistemik, atau membangun keseimbangan baru yang lebih plural dan kooperatif.

Bagi Indonesia, pilihan strategis bukanlah berpihak pada satu kutub kekuatan, melainkan memperkuat kemandirian nasional dan konsistensi diplomasi bebas aktif. Dengan integrasi antara kapasitas domestik yang kokoh dan kebijakan luar negeri yang otonom, Indonesia berpeluang bukan sekadar menjadi arena perebutan pengaruh, tetapi aktor yang secara sadar membentuk arsitektur tata dunia multipolar yang lebih stabil, adil, dan inklusif sekaligus menunjukkan bahwa kepentingan nasional tidak harus dijalankan melalui logika serakahnomics, melainkan melalui keseimbangan antara kedaulatan dan tanggung jawab global.